

PERAN BIDANG REHABILITAS DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN FAKIR MISKIN DI KABUPATEN SUMEDANG

Abdurrahmat Fathoni¹, Dadang Priatna^{*2}, Relinda Saskia³
^{1,2,3}Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received Nov 12, 2023

Revised Des 15, 2023

Accepted Des 23, 2023

Keywords:

Local Government

The Role of Local Government

Poverty Eradication

ABSTRACT

Role is a dynamic aspect in the form of actions or behaviors that carry out rights and obligations in accordance with their position. The role of the Social Service in its implementation turns out that there are still many that are not running because one of the factors that results in the high number of poverty is the character of some residents of Sumedang regency who are not good, namely their recognition as poor people, especially when there are programs from the government, so it is not uncommon for poor people who need help not to get a share in the program. This study aims to examine the role of social services in handling the poor in Sumedang district. This research uses a qualitative approach. The number of informants in the study was 4 people. Data collection techniques are carried out with interviews and documentation. Meanwhile, the data validation technique that researchers use is triangulation. The selection of informants is based on that the informant has knowledge, and information regarding the subject matter carefully. The results showed that the role of the Social Service in handling the poor in Sumedang district is seen from the aspect of the government as a regulator in the government's poor handling program that still does not play an active role in improving the economy so that poverty can be explained and resolved. The government as a dynamicator, the Sumedang Regency government in improving the economic quality of the community so that government programs related to handling the poor in Sumedang Regency are still not running well. The government as a facilitator, social service provides good services and facilities, especially in the implementation of poverty reduction programs, but the government as a facilitator has not played an active role in building conditions that are conducive to the implementation of regional development.



Copyright © 2023 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Dadang Priatna

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas April

Jl. Angkrek Situ No. 19 Sumedang

Email: dadang_priatna@unsap.ac.id

1. INTRODUCTION

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai penduduk yang sangat banyak, maka diperlukan peningkatan pembangunan untuk menopang kesejahteraan penduduknya. Sebagaimana yang telah di jelaskan bahwa pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Selain itu, tujuan Pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual, serta menjalankan roda perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan Sosial. Sesuai dengan Pasal 34 UUD 1945 dimana sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan Negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Fakir miskin merupakan masalah utama Negara yang sedang membangun termasuk Negara Indonesia, dimana penanggulangannya perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh, kreatif dan berkesimbangan. Permasalahan fakir miskin merupakan agenda serius yang sedang dihadapi dan ditanggulagi oleh wilayah Kabupaten Sumedang. Maka dari itu peran pemerintah Kabupaten Sumedang sangat diperlukan dalam hal ini Dinas Sosial sebagai bagian dari Lembaga pemerintah Kabupaten Sumedang yang berfokus pada pembangunan kesejahteraan sosial harusnya sangat berperan dalam menutaskan masalah kemiskinan.

Terjadinya kemiskinan dikarenakan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, ketidakmampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapinya. Kemudian faktor eksternal yaitu kebijakan publik yang belum sepenuhnya merata kepada masyarakat miskin, kurangnya pengawasan terhadap terlaksananya program. Fakir miskin merupakan masalah sosial yang mendasar dan sangatlah banyak dampak yang ditimbulkan membuat pikirannya menjadi sempit sehingga ia berfikir bahwa menjadi pengemis itu cara yang tepat. Namun sesungguhnya itu tidak benar, dan tindakan ini membuat Negara kita ini memiliki pengangguran yang selalu bertambah. Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan rakyatnya. Karena kemiskinan merupakan masalah sosial ekonomi, tidak hanya di alami oleh Negara berkembang bahkan juga di alami oleh Negara maju itu sendiri.

Informasi bisa didapat oleh manusia melalui sebuah komunikasi dengan manusia lain agar dapat tetap mempertahankan kehidupannya. Ia harus mendapat informasi dari orang lain, dan ia memberikan informasi kepada orang lain. Ia perlu mengetahui kejadian di sekitarnya, di tempat tinggal, di kotanya, hingga negaranya. Manusia membutuhkan akses untuk mendapatkan informasi itu. Dengan semakin berkembangnya kecanggihan teknologi informasi saat ini, manusia dapat dengan mudah mendapatkan informasi mendapatkan informasi melalui media-media yang ada di sekitarnya. Dari media cetak seperti koran, hingga media elektronik seperti televisi. Dan selain itu, saat ini telah muncul sebuah informasi yang berhasil di ciptakan manusia melalui perkembangan teknologi yang dapat di akses melalui jaringan internet. Manusia dapat dengan mudah mendapatkan apa yang ingin ia tahu, dan dapat dengan mudah pula menyebarkan informasi yang ia tahu kepada orang lain.

Dibuktikan dalam Renstra bidang pelayanan Selama periode 2014-2018, pelaksanaan peran dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang telah diupayakan secara optimal, namun sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki pada periode 2019-2023. Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan empat aspek, yakni :

- 1) Belum adanya Payung hukum / Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lingkup Kabupaten Sumedang. Hal ini Dibuktikan dalam Renstra bidang pelayanan Selama periode 2014-2018, pelaksanaan peran dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang telah diupayakan secara optimal, namun sesuai hasil pencapaian kinerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu dengan diperbaiki pada periode 2019-2023.
- 2) Permasalahan dalam Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Hal ini Dibuktikan dalam Renstra bidang pelayanan Selama periode 2014-2018, pelaksanaan peran dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang teridentifikasi isu strategis dari aspek pelayanan urusan bidang sosial yaitu masih belum optimalnya kualitas pelayanan pemerlu kesejahteraan sosial (PPKS).
- 3) Permasalahan dalam Bidang Pemberdayaan Sosial. Hal ini Dibuktikan dalam Renstra bidang pelayanan Selama periode 2014-2018, pelaksanaan peran dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang pelaksanaan peran dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang telah diupayakan secara optimal, namun sesuai hasil pencapaian kinerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu dengan diperbaiki pada periode 2019-2023. Yaitu Kuantitas SDM belum memadai

Berdasarkan fenomena permasalahan diatas, ada beberapa indikasi yang diduga sebagai penyebab belum optimalnya peran bidang rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dalam penanggulangan fakir miskin. Hal ini dapat diketahui dari adanya beberapa indikasi masalah yang ditemukan antara lain:

- 1) Masih belum adanya payung hukum/peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Sosial Lingkup Kabupaten Sumedang
- 2) Masih banyak permasalahan di bidang pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- 3) Masih kurangnya peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat miskin

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasinya (Sugiyono, 2017).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Sedangkan untuk pengolahan data menggunakan model analisis data Milles dan Huberman (Sugiyono, 2017) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Instrumen atau alat ukur dalam penelitian ini merujuk pada teori peran pemerintah (Fathoni, 2009) yang terdiri dari:

- 1) Pemberdayaan
- 2) Pelayanan
- 3) Pengaturan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sample dimana yang dijadikan informan penelitian adalah orang-orang yang dianggap memiliki prioritas dan dapat memberikan argumen bahwa mereka mengetahui banak fenomena yang terjadi di lapangan. Berikut ini data yang menjadi informan penelitian pada penelitian ini.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala bidang rehabilitasi sosial	1
2	Sekretaris bidang rehabilitasi sosial	1
3	Satf bidang rehabilitasi sosial	1
Jumlah		3

3. RESULTS AND DISCUSSION

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto dalam Soekanto, 2014). Sebagaimana peraturan bupati Nomor 38 tahun 2016 tentang Sumedang, Dinas Sosial kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja perangkat Daerah Kabupaten anak Kabupaten Sumedang mempunyai tugas, Fungsi, dan Struktur organisasi berikut. Dinas Sosial Kabupaten Sumedang yang merupakan unsure pelaksana perintah Kabupaten Sumedang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di Bidang Sosial.

Berdasarkan definisi ini peran pemerintah bidang rehabilitasi sosial memiliki dimensi yang bersumber dari Fathoni (2009) yang menyebutkan peran dan fungsi pemerintah sebagai berikut:

- 1) Pengaturan
Pemerintah memiliki fungsi pengaturan (*regulating*) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. Hal ini dikemukakan oleh Manan (2018), bahwa “peraturan perundang – undangan adalah keputusan tertulis Negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingka laku yang bersifat dan mengikat secara umum”.
- 2) Pelayanan
Menurut Sampura dalam Simbeda (2011) pelayanan adalah “Suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan”.

3) Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan dijelaskan oleh Agustino (2007:197) bahwa “secara teoritik merupakan sebuah (konsep) gerakan perlawanan pembangunan alternative terhadap hegemoni konsep pembangunan developmentalisme, tepatnya modernisasi”. Konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagian atau sejiwa dengan aliran aliran pada paruh kedua abad ke -20, yang dewasa ini banyak dikenal sebagai aliran post modernism, dengan titik berat sikap dan pendapat yang orientasinya adalah anti sistem, anti struktur dan anti determinisme, yang diaplikasikan kepada dunia kekuasaan (Silalahi, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan hasil Peran bidang rehabilitasi dinas sosial dalam penanggulangan fakir miskin di Kabupaten Sumedang sebagai berikut;

Tabel 2. Kesimpulan Peran Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Pakir Miskin Di Kabupaten Sumedang

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
1	Pemberdayaan	Fasilitas	Pada dasarnya fasilitas yang tersedia di kantor Dinas Sosial Kabupaten Sumedang belum memadai secara maksimal jika menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini.
		Potensi pegawai	Akan ada beberapa masalah yang timbul dari permasalahan potensi pegawai yang kurang maksimal, salah satunya pelayanan kepada masyarakat. Tentu ini akan menghambat bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
2	Pelayan	Pelayanan online	Terjadinya server maintance akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintah, terkhusus pada bidang IT yang menjadi salah satu elemnt penting dalam peran pemerintah untuk menyebarkan informasi.
		Terjangkau seluruh masyarakat	Informasi yang tidak terjangkau oleh seluruh masyarakat yang diakibatkan oleh berbagai faktor akan menjadi hambatan bagi pemerintah dalam menjalankan perannya.
		Sosialisasi	Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk terus mengedukasi masyarakat akan sangat berpengaruh dan menghambat terhadap perannya dalam penanggulangan fakir miskin.
3	Pengaturan	Regulasi	Regulasi yang tidak tepat waktu dalam penanggulangan fakir miskin tidak akan mempengaruhi tugas dari Dinas Sosial karena adanya evaluasi yang akan menutupi kesalahan kinerja.
		Polemik	Adanya polemic baru di tengah-tengah masyarakat sebagai bentuk reaksi terhadap regulasi baru akan mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah kedepannya. Sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk meyakinkan masyarakat guna terciptanya suatu tatanan kehidupan yang baik.
		Sasaran Regulasi	Regulasi yang tidak tepat sasaran akan menghambat kinerja pemerintah karena akan memunculkan polemic baru di tengah-tengah masyarakat yang mengharuskan adanya evaluasi kembali, atau bahkan perubahan pada regulasi tersebut.

Berdasarkan tabel di atas, faktor-faktor penghambatan pemerintah dalam penanggulangan fakir miskin adalah kurang terjangkaunya informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Tidak terjangkaunya suatu informasi oleh masyarakat, terjadi karena kurang maksimalnya pelayanan informasi yang diberikan oleh pemerintah, dan juga karena beberapa masyarakat belum memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan informasi tersebut.

4. CONCLUSION

Peran Pemerintah untuk membatasi penyebaran fakir miskin sudah mulai dipersiapkan dengan beberapa kebijakan dan pengembangan pegawai untuk bisa beradaptasi dengan era digital saat ini, sehingga mampu memanfaatkan berbagai macam *Platform* media sosial untuk mengawasi setiap informasi yang tersebar di masyarakat dan memberikan pelayanan informasi terbuka kepada masyarakat. Namun, dalam pelayanan informasi kepada masyarakat masih belum terlaksana dengan baik karena masih belum bisa terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat diberbagai daerah kabupaten Sumedang. Hal ini berdampak pada masih terdapatnya beberapa informasi keliru yang disebar luaskan oleh masyarakat tanpa adanya wadah untuk masyarakat mencoba mendapatkan klarifikasi langsung oleh pemerintah.

REFERENCES

- Abdurrahmat Fathoni, 2009. *Organisasi & Manajemen Sumberdaya Manusia..* Jakarta: CV Rineka Cipta.
- Akadun. 2011. *Teknologi Informasi Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2018 *Ekologi Administrasi Holistik, Kontemporer dan Kontekstual*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Bungin, H.M. Burhan. 2008 *penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Hasibuan, Malayu.S.P 2017. *Manajemen sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Iskandar, Jusman. 2014. *Kapita Selekta Administrasi Negara Dan Kebijakan Publik*. Bandung: puspaga
- LAN RI. 2003. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Meleong, Lexy, J. 2014 *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Revida, Erika dkk. 2020. *Teori Administrasi Publik*. Medan: Yasan kita menulis.
- Siagian, Sondang P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulbert. 2011. *Studi tentang ilmu Administrasi, Konsep teori dan dimensi*. Bandung: CV sinar baru
- STIA Sebelas April Sumedang. 2021. *Buku Pedoman Penulisan skripsi*. Sumedang: STIA Sebelas April sumedang.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.